

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM POIN PELANGGARAN DALAM UPAYA MEMBENTUK SISWA BERKARAKTER SMA ISLAM YAKIN TUTUR PASURUAN

**Jatim Desiyanto, Yuni Pantiwati, Agus Tinus\***  
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia  
\*Email: [agt.tns.umm@gmail.com](mailto:agt.tns.umm@gmail.com)

**Abstract:** The study aims to 1) describe the implementation of point system policies to form students with character; 2) describe the effectiveness of the point system policy to form students with character; 3) describe the constraints and solutions in implementing the point system policy. This research uses descriptive qualitative method, with a qualitative approach. The results showed that: 1) The implementation of the point system policy of planning, implementation, and evaluation had been carried out according to stages and had an impact on changing the character of students, but the results obtained were not optimal because it was influenced by the existence of supporting resources that did not meet; 2) The effectiveness of the point system policy is seen based on the results of the policy performance which includes the tasks of the implementing component, the achievement of policy objectives, the implementation of policy rules, and the achievement of results, which are already quite effective. This is measured through the achievement of policy program objectives that have been achieved, such as a decrease in the number of violators each semester and changes in the character of students, although not all character values are met through a point system policy; 3) Constraints faced by schools in implementing policies, namely: the lack of concern for some teachers towards disciplinary violators, the lack of supporting resources, the existence of a number of guardians of students not supporting them, weak coordination between teachers, and weak supervision. The solutions made by the school, by giving direction to the teacher through regular meetings, making maximum use of available resources, giving direction to the guardians of students, making evaluation studies by holding special meetings and requiring each board of teachers involved to make a report.

**Keywords:** Violation Points System; Effectiveness; Character.

**Abstrak:** Tujuan Penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem poin dapat membentuk siswa berkarakter; 2) Mendeskripsikan efektivitas kebijakan sistem poin membentuk siswa berkarakter; 3) Mendeskripsikan kendala dan solusi dalam mengimplementasikan kebijakan sistem poin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan sistem poin dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sudah terlaksana sesuai tahapan serta berdampak terhadap perubahan karakter siswa, namun hasil yang diperoleh belum maksimal hal tersebut dipengaruhi keberadaan sumber daya pendukung yang kurang memenuhi; 2) Efektivitas kebijakan sistem poin dilihat berdasarkan hasil kinerja kebijakan yang meliputi tugas dari komponen pelaksana, ketercapaian tujuan kebijakan, keterlaksanaan aturan kebijakan, dan pencapaian hasil, sudah cukup efektif. Hal tersebut diukur melalui pencapaian tujuan program kebijakan yang sudah tercapai, seperti penurunan jumlah pelanggar setiap semesternya serta perubahan karakter pada diri siswa, meskipun tidak semua nilai karakter terpenuhi melalui kebijakan sistem poin; 3) Kendala yang dihadapi sekolah dalam menjalankan kebijakan yaitu: kurang pedulinya sebagian guru terhadap pelanggar tata tertib, minimnya sumber daya pendukung, adanya beberapa wali murid kurang mendukung, lemahnya koordinasi antar guru, dan lemahnya pengawasan. Solusi yang dilakukan sekolah, dengan memberikan arahan terhadap guru melalui rapat rutin, memberdayakan sumber daya yang ada secara maksimal, memberikan pengarahan terhadap wali murid, membuat kajian evaluasi dengan mengadakan rapat khusus dan mewajibkan setiap dewan guru yang terlibat membuat laporan.

**Kata kunci:** Sistem Poin Pelanggaran; Efektivitas; Karakter.

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mempersiapkan peserta didik, agar dapat memainkan perannya di masa depan (Hadianti, 2008). Pendidikan merupakan usaha dasar untuk mengembangkan kepribadian yang berlangsung di sekolah maupun di luar sekolah. Sekolah merupakan pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak remaja (Puspitaningrum, 2014; Putra, 2015). Sekolah adalah lembaga pendidikan untuk membentuk watak, kepribadian dan menimba ilmu sehingga terbentuklah siswa yang berbudaya luhur, serta berdisiplin tinggi (Solihuddin, 2013; Puspitaningrum, 2014). Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mampu mempersiapkan dan membentuk peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, serta dapat mengembangkan kemampuannya lebih lanjut.

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional salah satu diantaranya terkandung harapan yang sangat mulia, yaitu terciptanya peserta didik yang berkepribadian baik serta memiliki akhlak yang mulia. Kenyataannya, beberapa masalah besar melanda dunia pendidikan kita saat ini, yaitu menurunnya etika moral peserta didik yang merisaukan masyarakat dalam bentuk banyaknya penyimpangan-penyimpangan tingkah laku peserta didik. Kenyataan sehari-hari banyak dijumpai siswa yang tidak disiplin dan menyimpang dari norma (Putri, 2015). Penyebab perilaku tidak disiplin tersebut terbentuk karena pengalaman dan pembelajaran yang salah dari lingkungan keluarga maupun sekolah, sehingga anak akan mencontoh atau meniru dan menerapkan perilaku yang salah pula sesuai dengan model yang diamati

(Rachmawati, 2011; Tentama, 2012). Kondisi seperti ini harus segera dilakukan antisipasi, karena hal ini akan mengancam generasi muda penerus bangsa, khususnya tata kehidupan masyarakat pada umumnya.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan bahwasannya sekolah/madrasah diharuskan menetapkan pedoman tata tertib untuk menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif. Pemahaman akan tata tertib sangatlah penting, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya di sekolah, seperti pemberian hukuman fisik terhadap para pelanggar tata tertib. Mengatasi masalah ketertiban siswa hukuman fisik masih banyak digunakan (Ajowi, 2010). Pengertian disiplin sekolah kadangkala diterapkan untuk memberikan hukuman (sanksi) sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan, meski kadangkala menjadi kontroversi dalam menerapkan metode pendisiplinannya, sehingga terjebak dalam bentuk kesalahan perlakuan fisik (*physical maltreatment*) dan kesalahan perlakuan psikologis (*psychological maltreatment*), (Kasih, 2015). Hukuman fisik dapat digambarkan sebagai penggunaan kekuatan fisik yang diharapkan untuk menyebabkan rasa sakit, tetapi tidak menyebabkan luka atau mengalami kerugian, dalam upaya mengendalikan perilaku anak (Lansford, 2010; Alhassan, 2013; Nwosu, 2013).

Penegakan tata tertib yang dilakukan Guru terkadang malah berujung pada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkadang berujung kepada ancaman hukuman penjara, hal ini tentu akan berpengaruh terhadap tugas guru. Ridwan (2015) menjelaskan pada tahun 2015, Komnas Perlindungan Anak melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) mencatat, 62% kekerasan terhadap anak terjadi di lingkungan terdekat seperti keluarga dan lingkungan sekolah, selebihnya 38% di ruang publik. Ada tiga faktor yang mempengaruhi

perilaku agresif anak (1) proses belajar, (2) penguatan (*reinforcement*) dan (3) imitasi peniruan terhadap model (Tentana, 2012). Kasus kekerasan yang terjadi di institusi pendidikan, mengindikasikan bahwa *mainstream* kekerasan masih digunakan dalam pola pembelajaran di dunia pendidikan (Diyah, 2016). Beberapa penelitian di dalam studi menyimpulkan bahwa hukuman fisik bukanlah suatu metode untuk menangani permasalahan (Alhassan, 2013).

Penegakan tata tertib dengan cara hukuman fisik menjadi tidak wajar dilakukan di sekolah-sekolah dengan alasan melanggar HAM. Ketika ada guru yang mencubit siswa, padahal maksudnya adalah mengingatkan siswa, tetapi bisa dijerat dengan menggunakan dasar Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *The American Academy of Child and Adolescent Psychiatry opposes the use of corporal punishment in schools and takes issue with laws in some states legalizing such corporal punishment and protecting adults who use it from prosecution for child abuse* (AACAP, 2014). Banyak metode lain yang dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku siswa yang tidak sesuai di sekolah, selain menggunakan hukuman fisik. Guru sebagai pendidik harus didorong untuk mengembangkan perilaku positif siswa yang akan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan produktif. Sekolah sebagai wadah pendidikan merupakan salah satu komponen dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa, memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan dari suatu proses pembelajaran (Mahfud, 2014). Sekolah juga diharapkan mampu memberi sarana dan prasarana yang menunjang bagi guru dan murid-murid sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik (Diana, 2013).

Tugas seorang pendidik harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan terbebas dari adanya

kekerasan fisik terhadap siswa. Guru yang memiliki kepribadian yang baik dapat menumbuhkan motivasi dalam diri siswa (Kheruniah, 2013). Banyak siswa bersemangat, bergairah, dan menyenangkan untuk belajar dengan seorang guru karena kepribadian guru baik dan menarik. Guru secara luas diyakini sebagai pelaku utama dari setiap perubahan pendidikan (Abuhmaid, 2011). Perubahan tersebut mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya (Zubaedi, 2011). Guru yang efektif dan kompeten secara profesional ialah guru yang memiliki karakteristik kemampuan (Suprastowo, 2013). Murphy (2010) merekomendasikan "*Promote the use of positive behavioral supports, well as provide teachers and school administrators with the tools and resources necessary to develop safe and effective methods for encouraging positive student behavior*".

Bentuk hukuman yang diberikan pada siswa sebaiknya bersifat positif sehingga hasilnya pun berbuah positif. Secara multidimensi hukuman fisik berdampak terhadap prestasi akademik siswa, jiwa dan pengembangan kepribadian (Naz, 2011). Sekolah harus membuat hukuman positif yang efeknya tetap membuat jera para pelanggar tata tertib sekolah, salah satunya dengan menerapkan sistem poin. Kebijakan sistem poin pelanggaran yang diterapkan di SMA Islam Yakin Tutar Pasuruan didasarkan atas permasalahan yang ada di sekolah tersebut, seperti banyaknya pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa di sekolah. Pelaksanaan tata tertib sekolah yang tidak terkonsep dengan baik, dan selalu berujung terhadap hukuman fisik. Penerapan kebijakan sistem poin pelanggaran diharapkan dapat mengkonsep tata tertib sekolah lebih baik lagi, tanpa adanya kekerasan dalam menerapkannya, sehingga dapat

membentuk siswa berkarakter sesuai dengan konsep Penguatan Pendidikan Berkarakter (PPK). Penerapan sistem poin dalam tata tertib sekolah, setiap kesalahan atau pelanggaran akan di kenakan poin yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesalahannya (Anggraini, 2015).

Implementasi kebijakan sistem poin pelanggaran di sekolah menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang dilakukan siswa menurun drastis, perilaku siswa sudah mulai menunjukkan adanya perilaku yang berkarakter diantaranya, berdisiplin, menghormati norma-norma hukum yang berlaku, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat (Indarto, 2007; Ashari 2013; Solehuddin 2013; Anggraini 2015; Nuriyah, 2015). Beberapa hasil penelitian menunjukkan, penerapan kebijakan sistem poin dapat menekan jumlah pelanggaran siswa akan tata tertib, sehingga dapat menghilangkan hukuman fisik pada siswa karena hukuman siswa sudah terkonsep dalam bentuk poin pelanggaran. Rata-rata jumlah pelanggaran siswa dengan poin rendah, ini artinya secara keseluruhan pelanggaran masih kategori ringan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji kebijakan sistem poin pelanggaran di SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan. Sejalan dengan hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan permasalahan berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan sistem poin dapat membentuk siswa berkarakter? 2) Bagaimana efektivitas kebijakan sistem poin dalam membentuk siswa berkarakter? 3) Apa kendala dan solusi yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan sistem poin sebagai sarana pembentukan siswa berkarakter?

Tujuan Penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem poin dapat membentuk siswa berkarakter; 2) Mendeskripsikan efektivitas kebijakan sistem poin membentuk siswa berkarakter; 3) Mendeskripsikan kendala

dan solusi dalam mengimplementasikan kebijakan sistem poin.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, sedangkan desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi tiga aspek yaitu: 1) Tempat (SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan) sebagai sekolah yang menerapkan kebijakan sistem poin pelanggaran; 2) Pelaku, merupakan komponen pelaksana meliputi Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, Guru beserta komponen lain yang terlibat; 3) Aktifitas (komponen pelaksana dalam menjalankan kebijakan) yang berinteraksi secara sinergis. Landasan teori akan difungsikan sebagai bekal untuk memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam.

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan rumusan masalah maka dilakukan teknik pengumpulan data yaitu: (1) Observasi; (2) Wawancara; dan (3) Dokumentasi. Teknik yang ada kemudian dibuat lembar instrumen penelitian yang meliputi: 1) Lembar Observasi, dengan maksud peneliti ingin mengamati peristiwa atau aktivitas mengenai bentuk dan pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran; 2) Pedoman wawancara, dengan maksud untuk menggali lebih mendalam dari beberapa informan mengenai bagaimana kebijakan sistem poin diimplementasikan, efektivitas kebijakan sistem poin dalam membentuk siswa berkarakter serta kendala dan solusi selama kebijakan sistem poin di terapkan di SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan; 3) Studi Dokumen, dengan maksud peneliti ingin mengetahui isi dokumen tentang pedoman klasifikasi bobot poin serta prosedur pelaksanaannya. Instrumen penelitian dalam penelitian ini, lebih jelasnya dapat dilihat secara terlampir.

Analisis data dalam penelitian ini mempunyai empat pangkal kegiatan berdasarkan Milles & Huberman dalam Sugiyono (2010) yaitu sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, yang meliputi wawancara, observasi dan studi dokumen; 2) Reduksi data, merupakan proses pemilahan data wawancara observasi dan studi dokumen sesuai dengan peruntukannya; 3) Penyajian data dilakukan setelah reduksi data selesai, kemudian dibuat laporan hasil penelitian; 4) Verifikasi data/menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan. Keempat siklus di atas, semuanya harus berjalan secara seimbang sehingga dalam penarikan kesimpulan tidak terjadi kekurangan. Apabila dalam penarikan kesimpulan terdapat kekurangan maka dapat dicari data kembali di dalam lapangan oleh peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi kebijakan sistem poin pelanggaran dalam membentuk siswa berkarakter**

Berdasarkan dokumen Surat Keputusan (SK) kepala sekolah, kebijakan sistem poin pelanggaran dalam tata tertib sekolah di SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan dimulai pada tahun pelajaran 2007/2008 yang disahkan oleh kepala sekolah. Bentuk dari kebijakan sistem poin pelanggaran berupa aturan tata tertib sekolah. Sistem poin pelanggaran merupakan sebuah kebijakan sekolah yang diambil guna mengurangi tingkat pelanggaran siswa di sekolah. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah tentang standar pengelolaan, bahwasannya lembaga sekolah harus memiliki pedoman tata tertib bagi siswanya. Peranan tata tertib di sekolah untuk mengatur kegiatan para siswa, baik yang bersifat kurikuler maupun ekstrakurikuler sehingga dapat membentuk

siswa berkarakter. Penegakan tata tertib siswa merupakan bagian dari program kerja wakil kepala sekolah bidang kesiswaan.

Kebijakan sistem poin pelanggaran di perkenalkan kepada wali murid pada awal masuk tahun ajaran baru. Hal tersebut perlu dilakukan, agar wali murid mengetahui aturan yang berlaku disekolah. Tangapan wali murid setelah mengetahui kebijakan sekolah cukup beragam, sebagian besar merespon dengan baik dan mendukung, meskipun ada beberapa yang kurang setuju.

### **Perencanaan kebijakan**

Kebijakan sistem poin pelanggaran dalam upaya penegakan tata tertib siswa di SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan diawali dari kegiatan perencanaan kebijakan. Perencanaan kebijakan sistem poin pelanggaran, kegiatannya meliputi: 1) Perumusan tujuan kebijakan; 2) Pemilihan program untuk mencapai tujuan; 3) Adanya sumber daya pendukung.

Perumusan tujuan kebijakan sistem poin pelanggaran sesuai yang tertuang dalam dokumen visi, misi dan tujuan sekolah yaitu membentuk karakter siswa yang disiplin, taqwa, cerdas, terampil, mandiri, kreatif dan kompetitif serta mengembangkan tujuan pendidikan nasional secara umum dan tujuan pendidikan islam secara khusus. Disamping itu, tata tertib ini dilengkapi dengan poin pelanggaran, beberapa larangan, serta sanksi. Strategi yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan sistem poin pelanggaran ini adalah bagaimana menemukan cara terbaik yang lebih terkontrol dengan adanya panduan yang jelas dan transparan dalam penegakkan tata tertib siswa.

Keberadaan sumber daya pendukung dalam suatu implementasi kebijakan sangatlah penting mengingat hal tersebut akan menjadi penentu keberhasilan suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Kelengkapan sumber daya pendukung di SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan

sudah cukup lengkap untuk menunjang pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran. Namun ada beberapa sumber daya pendukung berkenaan dengan sarana prasarana sekolah yang perlu perbaikan ataupun pengadaan sarana baru.

### **Pelaksanaan kebijakan**

Pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran di SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan mencakup lima kegiatan pokok, yaitu: 1) Waktu pelaksanaan kebijakan; 2) Keterlibatan sumber daya pendukung; 3) Indikator proses dalam mengimplementasikan kebijakan; 4) Kepatuhan terhadap kebijakan; 5) Indikator keberhasilan kebijakan untuk mencapai tujuan. Proses pelaksanaan dapat dikatakan berhasil ketiga semua komponen dapat terpenuhi secara baik.

Waktu pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran mulai berlaku terhadap siswa selama siswa berada di sekolah. Artinya, ketika siswa berada diluar jam sekolah tidak lagi menjadi tanggung jawab sekolah untuk memantau aktivitas siswa. Pemberian poin pada siswa yang melanggar akan selalu dipantau untuk menentukan langkah yang harus ditempuh bagi pihak sekolah apabila poin yang diperoleh siswa sudah dalam taraf yang mengkhawatirkan. Siswa akan mendapatkan peringatan dari guru sebanyak dua kali, apabila peringatan itu tidak dihiraukan, maka pihak sekolah akan memberikan surat pemanggilan orang tua.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran akan melekat kepada siswa selama bersekolah dan berada di lingkungan sekolah. Sebagian besar siswa menyetujui diterapkannya kebijakan sistem poin pelanggaran. Dengan alasan dapat menjadi peringatan untuk mereka pribadi agar lebih patuh terhadap aturan sekolah.

Keterlibatan sumber daya pendukung sesuai isi dokumen prosedur pelaksanaan kebijakan, meliputi semua unsur pendidik

dan tenaga pendidikan. Pedoman pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran yang berupa acuan atau rambu-rambu aturan, perlu adanya keterlibatan semua komponen sekolah sehingga akan lebih mudah menentukan aturan yang jelas.

Proses dalam mengimplementasikan kebijakan sistem poin pelanggaran secara umum sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, meskipun belum maksimal. Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara dari beberapa informan serta didukung dengan studi dokumen dan observasi. Adapun prosedur pelaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan sistem poin pelanggaran sesuai dokumen pelaksanaan kebijakan antara lain: a) Seluruh guru memegang daftar tata tertib siswa; b) Buku catatan poin pelanggaran siswa di pegang oleh guru Bimbingan Koseling (BK); c) Guru yang menemukan siswa melakukan pelanggaran, maka Guru wajib memerintahkan siswa yang bersangkutan untuk mengisi dan menandatangani blangko pelanggaran siswa di ruang BK; d) Guru BK selanjutnya melaporkan kepada wali kelas dan wakil kepala sekolah bagian kesiswan, serta kepala sekolah guna memberikan penilaian terhadap pelanggaran siswa, selanjutnya pemberian tindakan/sanksi sesuai dengan jenis dan jumlah poin pelanggaran.

Pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran secara umum dapat dikatakan mampu membuat siswa patuh terhadap ketentuan sekolah berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah. Tingkat kepatuhan siswa secara perlahan dapat membentuk karakter siswa sesuai dengan visi misi sekolah, meskipun secara keseluruhan belum maksimal. Pelaksanaan yang belum maksimal menyebabkan tingkat keberhasilan yang diperoleh sekolah juga belum sepenuhnya tercapai.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran di SMA Islam Yakin

Tutur Pasuruan dapat dikatakan berhasil menekan jumlah pelanggar tata tertib yang terlihat dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh. Berkurangnya pelanggar tata tertib diiringi dengan perubahan sikap siswa yang mulai berkarakter yaitu sikap disiplin. Kedisipinan siswa menjadi ujung tombak terhadap kegiatan lain disekolah yang akan turut memberikan dampak terhadap kepatuhan siswa.

### **Evaluasi kebijakan**

Evaluasi kebijakan sistem poin pelanggaran di SMA Islam Yakin Tutur Pasuruan dilakukan dengan membandingkan *input* (tujuan dari kebijakan), *Output* (keterlaksanaan kebijakan) dan *out comes* (hasil yang diperoleh dengan diterapkannya kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan). Tujuan utama kebijakan sistem poin pelanggaran yaitu: 1. Membentuk siswa berkarakter melalui lima karakter utama dalam Penguatan Pendidikan karakter (PPK); 2) Memudahkan pelaporan bagi sekolah terhadap wali murid berkaitan dengan pelanggaran siswa.

Keterlaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran secara umum sudah terlaksana dengan baik. Keterlaksanaan tersebut dilihat dari berjalannya prosedur kebijakan oleh pelaksana kebijakan, meskipun pelaksanaannya tidak maksimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya pendukung.

Berdasarkan dokumen data pelanggaran dan nilai poin pribadi peserta didik, pelanggaran yang dilakukan siswa masih dalam taraf pelanggaran ringan seperti terlambat masuk sekolah. Poin yang didapat siswa masih dalam kategori poin rendah yaitu rata-rata berkisar 20 poin, hal tersebut dapat dikatakan bahwa siswa sudah mulai mematuhi aturan kebijakan sistem poin.

Hasil yang diperoleh oleh sekolah dengan diterapkannya kebijakan sistem poin pelanggaran masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan kebijakan. Keterlaksanaan

kebijakan yang belum maksimal berdampak terhadap hasil yang diperoleh sekolah. Namun, secara umum hasil yang diperoleh sudah cukup baik, hal tersebut terlihat berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2017 bahwasannya sejauh ini hasil yang diperoleh sekolah adalah semakin patuhnya siswa terhadap ketentuan sekolah serta siswa mulai membentuk karakter dalam dirinya.

### **Efektifitas kebijakan sistem poin pelanggaran dalam membentuk siswa berkarakter**

Kebijakan yang dijalankan suatu lembaga sekolah dapat dikatakan efektif apabila empat aspek efektivitas kebijakan dapat tercapai. Keempat aspek tersebut meliputi: (1) Aspek tugas atau fungsi kebijakan; (2) Aspek rencana atau program kebijakan; (3) Aspek ketentuan dan peraturan kebijakan; dan (4) Aspek tujuan atau kondisi ideal kebijakan.

Kebijakan sistem poin pelanggaran yang berlaku di SMA Islam Yakin Tutur Pasuruan pada dasarnya sudah dilakukan pembagian tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing komponen pelaksana. Prosedur pelaksanaannya sendiri sudah dijalankan oleh komponen pelaksana kebijakan sesuai tugas dan fungsinya, akan tetapi tidak semua komponen menjalankan kebijakan sebagai mana mestinya. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara khusus menangani tata tertib siswa menjadi kendala utama dalam menjalankan kebijakan.

Diterapkannya suatu kebijakan tidak terlepas dari rencana dan program yang ingin dicapai oleh suatu pemangku kebijakan. Rencana dan program dalam menjalankan kebijakan sistem poin pelanggaran yaitu bagaimana sekolah memprogram siswa agar dapat membentuk siswa berkarakter sesuai dengan program pemerintah tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Program tersebut dapat dijalankan melalui kebijakan sistem poin pelanggaran.

Berjalanya aspek ketentuan dan aturan kebijakan dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan kebijakan yang telah dibuat dalam menjaga berlangsungnya proses kebijakan. Ketentuan dan aturan kebijakan sistem poin pelanggaran sudah dilaksanakan oleh komponen pelaksana kebijakan dalam upaya mengatur siswa disekolah.

Berdasarkan dokumen data pelanggaran dan nilai poin pribadi peserta didik, bahwasannya banyak ditemukan siswa terlambat masuk sekolah. Poin pelanggaran yang paling banyak diperoleh siswa yaitu berkaitan dengan terlambat masuk sekolah. Siswa melakukan pelanggaran tersebut hingga berulang-ulang dengan nama siswa yang sama.

Aspek dan tujuan kondisi ideal kebijakan sistem poin, diukur dari sudut hasil yang diperoleh, jika tujuan atau kondisi ideal program kebijakan dapat tercapai maka kebijakan sistem poin pelanggaran dapat dikatakan efektif. Hasil dari penerapan kebijakan sistem poin pelanggaran terlihat dari berkurangnya para pelanggar tata tertib sekolah dalam setiap semesternya. Selain itu beberapa informan menyatakan siswa mulai lebih disiplin dalam menaati peraturan sekolah. Siswa juga lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan kesiswaan seperti ekstrakurikuler sekolah.

### **Kendala dan solusi kebijakan sistem poin pelanggaran**

Pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan di lembaga sekolah, tentunya tidak terlepas dari sebuah kendala ataupun permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan biasanya muncul dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang akan mengganggu keterlaksanaan suatu program kebijakan, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut penyelesaian dari permasalahan yang timbul. Pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran di SMA Islam Yakin Tuter

Pasuruan menghadapi beberapa masalah dalam pelaksanaannya, sehingga terkadang sedikit mengganggu hasil pencapaian yang harus diperoleh sekolah dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam suatu pelaksanaan kebijakan perlu dilakukan tindak lanjut penanganan, sehingga masalah-masalah yang timbul dapat segera diatasi. Beberapa solusi telah dilakukan sekolah untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur yang ada dengan maksimal, koordinasi yang matang sebelum kebijakan dijalankan.

Beberapa solusi yang telah dilakukan sekolah merupakan suatu upaya agar suatu aturan dalam kebijakan sistem poin dapat terlaksana dengan baik, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Kebijakan sistem poin pelanggaran yang telah dijalankan sekolah sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala dalam menjalankannya, akan tetapi secara perlahan permasalahan tersebut dapat diatasi melalui solusi yang dilakukan pihak sekolah, meskipun membutuhkan waktu yang cukup panjang.

### **Implementasi kebijakan sistem poin pelanggaran dalam membentuk siswa berkarakter**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan sistem poin pelanggaran dalam upaya membentuk siswa berkarakter di SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan diawali dari perencanaan, pelaksanaan dan adanya pengendalian terhadap sikap siswa. Pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran dimulai dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor: PP/043/431/070.22/SMA. YK/2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang tata tertib siswa berbasis poin pelanggaran tahun pelajaran 2007/2008. Pada dasarnya suatu lembaga sekolah wajib membuat suatu pedoman tata tertib, selain sebagai

pengontrol siswa, juga digunakan sebagai upaya pencegahan atas pelanggaran yang dilakukan oleh siswa (Pinastika, 2016).

Perencanaan Kebijakan diawali dari perumusan tujuan kebijakan sistem poin. Tujuan diterapkannya kebijakan sistem poin untuk mendisiplinkan siswa dalam upaya membentuk siswa yang berakhlak. Pendidikan Karakter yang diberikan melalui tata tertib sekolah adalah berupa kontrak sosial yang dibuat antara kesepakatan sekolah dan siswa dengan mempertimbangkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Selain membentuk siswa berakhlak kebijakan sistem poin pelanggaran merupakan upaya sekolah memudahkan pelaporan pelanggaran siswa terhadap wali murid, memudahkan sekolah dalam memberikan klasifikasi pelanggaran kepada masing-masing siswa, serta menghindari terjadinya hukuman fisik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Himawan (2016), bahwasannya sistem informasi perhitungan poin pelanggaran ini dapat menjadi fasilitas atau media bagi orang tua dalam memantau perilaku dan kedisiplinan siswa di sekolah. Kebijakan pendidikan pada dasarnya bukan berdasar pada kekuasaan tetapi kepada kebutuhan peserta didik (Nugroho, 2009). Kebijakan pendidikan dalam konteks sekolah di pandang sebagai kerjasama dan pengambilan keputusan oleh individu berdasarkan keinginan kelompok sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang sah dalam bentuk kontrak yang sudah dinegosiasi (Rawita, 2010). Kekuasaan yang dimiliki oleh pemangku kebijakan, sudah seharusnya diarahkan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi kekuasaan untuk memfasilitasi dalam pengembangan kemerdekaan peserta didik. Kepala SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan memberikan kebijakan sistem poin pelanggaran dengan melihat semua sisi manfaat dan kelemahan yang ada, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Keberadaan sumber daya pendukung akan sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan kebijakan. Pemanfaatan sumber daya pendukung sesuai dengan manajemen pendidikan akan menjadi salah satu penunjang ketercapaian suatu tujuan pendidikan (Maimunah, 2014). Keberadaan sumber daya pendukung di SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan mengalami keterbatasan secara infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Keterbatasan sumber daya pendukung yang dimiliki sekolah menyebabkan upaya sekolah membentuk karakter siswa sesuai dengan lima karakter utama Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) belum terlaksana maksimal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Karaffillis (2016), bahwasannya keberadaan infrastruktur sekolah menjadi penyebab timbulnya gangguan disekolah selain latar belakang keluarga siswa.

Pelaksanaan kebijakan sistem poin diimplementasikan pada waktu siswa berada disekolah. Pada saat siswa berada diluar jam sekolah, aturan kebijakan tidak lagi melekat pada diri siswa. Pelaksanaan kebijakan sistem poin dikendalikan oleh pelaksana kebijakan yang meliputi kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan kebijakan, wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, wali kelas, guru Bimbingan Konseling (BK) dan guru mata pelajaran.

Pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran dalam membentuk perilaku siswa yang berakhlak sudah memiliki alur dan mekanisme yang baik, namun keterlaksanaannya masih belum maksimal. Kurangnya tenaga pendidik yang secara khusus menangani tata tertib menjadi salah satu penyebab tidak tertibnya alur dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Selain itu, tidak seiramanya antar guru dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan mekanisme, disebabkan lemahnya sistem pengawasan oleh pemangku kebijakan. Butuh kerja sama yang baik antar guru agar

tujuan kebijakan dapat tercapai, sehingga pelaksanaan pembelajaran di sekolah dapat kondusif karena semua siswa taat dan patuh terhadap aturan tata tertib sekolah. Menurut Sudirman, (2013) kerja sama yang baik antar guru dapat membantu kesulitan belajar siswa di sekolah.

Selama penerapan kebijakan sistem poin pelanggaran, siswa terlihat lebih patuh dan taat terhadap aturan sekolah. Hal tersebut dilihat dari poin yang diperoleh siswa, rata-rata masih dalam taraf poin rendah yaitu dibawah 20 poin. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Karana (2015) bahwasannya kebijakan sistem poin pelanggaran yang diberikan kepada siswa dapat memotivasi siswa untuk berperilaku sesuai aturan sekolah. Berkurangnya pelanggar tata tertib juga sejalan dengan pembentukan karakter dalam diri siswa, sehingga dapat dikatakan kebijakan tersebut cukup berhasil menekan jumlah pelanggar tata tertib dan membentuk siswa berkarakter. Adanya perubahan terhadap sikap siswa mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah cukup berhasil menekan jumlah pelanggar tata tertib dengan segala keterbatasan yang dihadapi sekolah.

Keterlaksanaan kebijakan selama ini sudah sesuai dengan tujuan utama kebijakan, akan tetapi dalam upaya pembentukan karakter siswa melalui kebijakan sistem poin masih belum sepenuhnya tercapai. Kelima karakter dari program PPK seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, sudah terlaksana cukup baik, namun belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan sekolah. Karakter yang perlu dilakukan penanaman lebih seperti karakter integritas, karena sesuai hasil wawancara dibanding dengan observasi dan dokumen, bahwasannya siswa belum sepenuhnya mencerminkan sikap integritas seperti jujur, memiliki komitmen, keadilan, dan tanggung jawab. Hal tersebut dibuktikan dari dokumen

poin pelanggaran siswa bahwa jumlah pelanggar terlambat masuk sekolah masih mendominasi dan terulang dengan siswa yang sama. Hal ini mencerminkan bahwa beberapa siswa masih belum memiliki karakter integritas dalam dirinya seperti memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk bisa masuk sekolah tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan kebijakan sistem poin pelanggaran dalam tata tertib sekolah mempunyai beberapa manfaat di antaranya, 1) dapat membentuk karakter dalam diri peserta didik, 2) mengurangi tingkat pelanggaran siswa, 3) membuat siswa lebih disiplin, 4) ada kejelasan tentang catatan pelanggaran siswa, 5) memberi peringatan (*warning*) pada siswa, 6) menghindari terjadinya hukuman fisik. Berbagai manfaat yang diperoleh siswa di atas, maka penerapan kebijakan sistem poin telah sesuai dengan beberapa fungsi hukuman diantaranya sebagai berikut: 1) Fungsi restriktif yang artinya hukuman dapat menghalangi terulangnya kembali pelanggaran; 2) Fungsi pendidikan yang artinya hukuman yang diterima anak merupakan pengalaman yang dijadikan pelajaran berharga; 3) Fungsi motivasi yaitu hukuman dapat memperkuat motivasi anak untuk menghindari perilaku negatif (Gaza, 2012).

Pembentukan karakter siswa di SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan tidak bisa hanya melalui kebijakan sistem poin pelanggaran, namun di kombinasikan melalui kegiatan pembinaan kesiswaan yang diadakan sekolah. Pembinaan kesiswaan merupakan pengembangan bakat dan minat siswa, agar siswa dapat memanfaatkan waktu luang di sekolah kedalam hal yang positif (Pinastika, 2016). Pembinaan kesiswaan yang dilakukan sekolah salah satunya seperti mengadakan pengajian rutin yang dilakukan pada jam sebelum dilaksankannya pembelajaran. Kegiatan pembinaan kesiswaan, juga dapat menjadi langkah antisipasi terhadap kenakalan siswa yang kapan saja dapat dilakukan oleh

siswa dengan cara mengalihkannya agar siswa dapat mematuhi tata tertib yang ada. Pembinaan perilaku disiplin bisa dilakukan melalui dua cara yaitu dengan melalui pendekatan hukuman (*punitive approach*) dan pendekatan tanpa hukuman (*non punitive approach*) (Budiarti, 2016). Penerapan kebijakan sistem poin pelanggaran dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengganti pemberian hukuman (*punishment*) yang bersifat fisik. Kebijakan sistem poin pelanggaran memiliki kelebihan diantaranya dapat menanggulangi tindak kekerasan fisik yang mungkin terjadi disekolah (Setyawan, 2014). Mengatasi para pelanggar tata tertib, pihak sekolah selalu memberikan hukuman yang sifatnya mendidik, untuk menanamkan jiwa karakter dalam diri peserta didik.

Evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem poin pelanggaran dilakukan dengan membandingkan *input*, *output* dan *out comes*. Tujuan utama kebijakan sistem poin pelanggaran agar dapat membentuk siswa berkarakter merupakan *input* kebijakan tersebut. Keterlaksanaan kebijakan sesuai prosedur yang ada merupakan *output* kebijakan, sedangkan hasil dari kebijakan sistem poin merupakan *out comes*. Upaya pembentukan karakter melalui kebijakan sistem poin pelanggaran secara umum sudah tercapai, namun pencapaiannya masih belum maksimal. Pencapaian tujuan yang kurang maksimal dipengaruhi oleh keterlaksanaan kebijakan oleh komponen pelaksana kurang maksimal dalam menjalankan kinerja kebijakan, sehingga hasil yang diperoleh masih belum maksimal. Secara umum pencapaian hasil dari kebijakan yang sudah tercapai, terlihat dari kegiatan siswa sehari-hari disekolah yang mulai menunjukkan berkarakter seperti penerapan budaya 3S (Salim, Sapa, Senyum) sesuai dengan visi misi sekolah membentuk siswa yang beriman dan berbudaya

### **Efektifitas kebijakan sistem poin pelanggaran dalam membentuk siswa berkarakter**

Kebijakan sistem poin pelanggaran cukup efektif untuk meningkatkan ketertiban siswa disekolah (Setyawan, 2014). Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian, bahwasannya kebijakan sistem poin pelanggaran di SMA Islam Yakin Tutur Pasuruan cukup efektif untuk mengurangi tingkat pelanggaran siswa dalam upaya membentuk siswa berkarakter. Kebijakan sistem poin pelanggaran dapat merubah tingkah laku peserta didik yang tidak baik frekuensinya dapat berkurang bahkan hilang.

Kinerja kebijakan yang telah dijalankan sesuai dengan target dan rencana pencapaian yang diantaranya sebagai berikut: 1) Tugas dari masing-masing komponen pelaksana sudah menjalankan kebijakan sesuai dengan prosedur, meskipun terkadang mekanisme dari prosedur yang ada tidak dijalankan sebagai mana mestinya, dikarenakan kurangnya sumber daya pendukung; 2) Ketercapaian tujuan atau target dari kebijakan sistem poin pelanggaran guna membentuk siswa berkarakter masih belum sepenuhnya tercapai, akan tetapi sejauh ini sudah memperlihatkan hasil yang cukup baik; 3) Keterlaksanaan aturan kebijakan sudah dijalankan oleh komponen pelaksana yang terlihat dari berkurangnya tingkat pelanggaran tata tertib yang selama ini menjadi permasalahan disekolah; 4) Pencapaian hasil yang diperoleh sekolah dilihat dari perubahan sikap siswa yang mulai menunjukkan berkarakter dan selalu patuh terhadap tata tertib sekolah serta selalu mengikuti kegiatan sekolah, namun masih ada nilai beberapa karakter yang belum terpenuhi.

Untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir efektivitas kebijakan dengan melihat pencapaian tujuan program (Richard, 2005; Rusdiana, 2015).

Pencapaian tujuan program dilihat berdasarkan hasil kinerja kebijakan yang meliputi tugas dari masing-masing komponen pelaksana, ketercapaian tujuan kebijakan, keterlaksanaan aturan kebijakan, dan pencapaian hasil. Berdasarkan hasil kinerja kebijakan bahwasannya kebijakan sistem poin pelanggaran cukup efektif diterapkan di SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan. Hal tersebut diukur melalui pencapaian tujuan program kebijakan yang sudah tercapai, seperti perubahan karakter pada diri siswa, meskipun tidak semua nilai karakter dalam PPK terpenuhi melalui kebijakan sistem poin. Selain itu jumlah pelanggar dalam tata tertib setiap semesternya mengalami penurunan. Hal tersebut sesuai dokumen data pelanggar dan poin pribadi peserta didik, bahwa poin yang di dapat siswa mengalami penurunan setiap semester.

### **Kendala dan solusi kebijakan sistem poin pelanggaran dalam membentuk siswa berkarakter**

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi sekolah dalam menerapkan kebijakan sistem poin pelanggaran diantaranya adalah: 1) Masih ada beberapa siswa yang melanggar disebabkan kurangnya kepedulian sebagian guru dalam penanganan pelanggaran tersebut; 2) Keberadaan sumber daya pendukung baik infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang memadai; 3) Sebagian wali murid kurang mendukung karena sosialisasi tentang penerapan kebijakan sistem poin pelanggaran dari pihak sekolah kepada orang tua siswa kurang maksimal; 4) Administrasi tentang kebijakan sistem poin pelanggaran yang belum tertata secara baik, karena kurangnya koordinasi antar guru yang melaksanakan kebijakan, sehingga masih terjadinya tumpang tindih dalam menindak lanjuti siswa; 5) Lemahnya sistem pengawasan membuat pelaksanaan kebijakan sistem poin

pelanggaran oleh komponen pelaksana belum sepenuhnya berjalan maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya, memaparkan mengenai strategi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala yang terjadi diantaranya sebagai berikut: 1) Mengatasi kurang pedulinya sebagian guru terhadap siswa yang melanggar, pihak sekolah melalui kepala sekolah mencoba memberikan arahan terhadap guru melalui rapat rutin, agar masing-masing guru bisa menunaikan tugas pokok dan fungsinya disekolah; 2) Mengatasi keterbatasan sumber daya pendukung yang masih belum lengkap untuk menunjang pelaksanaan kebijakan, pihak sekolah mencoba memberdayakan sumber daya yang ada secara maksimal, karena untuk pengadaan baru masih terkendala dengan dana; 3) Sebagian wali murid yang kurang mendukung, pihak sekolah mencoba mendatangi rumah wali murid dan memberikan penjelasan bahwa kebijakan sistem poin berguna untuk proses pemantauan perilaku siswa disekolah, sehingga pihak sekolah lebih mudah mengontrol siswanya; 4) Kurangnya koordinasi antar guru dalam menjalankan kebijakan sistem poin pelanggaran, pihak sekolah membuat kajian evaluasi dengan mengadakan rapat khusus yang wajib dihadiri semua dewan guru yang terlibat, agar tidak terjadi diskomunikasi dalam menjalankan kebijakan; 5) Lemahnya pengawasan terhadap komponen pelaksana pihak sekolah membuat strategi dengan mewajibkan setiap dewan guru yang terlibat membuat pelaporan tentang tugas dan fungsinya.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Implementasi kebijakan sistem poin pelanggaran yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

sudah terlaksana sesuai tahapan implementasi kebijakan dan berdampak terhadap perubahan karakter siswa, namun hasil yang diperoleh belum maksimal hal tersebut dipengaruhi pada tahap perencanaan yaitu keberadaan sumber daya pendukung yang masih kurang untuk menunjang implementasi kebijakan sistem poin pelanggaran; 2) Efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem poin dilihat berdasarkan hasil kinerja kebijakan yang meliputi tugas dari masing-masing komponen pelaksana, ketercapaian tujuan kebijakan, keterlaksanaan aturan kebijakan, dan pencapaian hasil.

Berdasarkan hasil kinerja kebijakan bahwasannya kebijakan sistem poin pelanggaran cukup efektif diterapkan di SMA Islam Yakin Tuter Pasuruan. Hal tersebut diukur melalui pencapaian tujuan program kebijakan yang sudah tercapai, seperti penurunan jumlah pelanggar tata tertib setiap semesternya serta perubahan karakter pada diri siswa, meskipun tidak semua nilai karakter dalam PPK terpenuhi melalui kebijakan sistem poin; 3) Kendala yang dihadapi sekolah yaitu kurang pedulinya sebagian guru terhadap pelanggar tata tertib, minimnya sumber daya pendukung, adanya beberapa wali murid yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan, lemahnya koordinasi antar guru, dan lemahnya pengawasan dari pelaksanaan kebijakan. Solusi dan strategi yang dilakukan sekolah berkaitan dengan kendala yang ada dengan melakukan memberikan arahan terhadap guru melalui rapat rutin, memberdayakan sumber daya yang ada secara maksimal, memberikan pengarahan terhadap wali murid, membuat kajian evaluasi dengan mengadakan rapat khusus, mewajibkan setiap dewan guru yang terlibat membuat pelaporan.

Berikut ini beberapa saran berkaitan dengan implementasi kebijakan sistem poin yang bisa diberikan kepada sekolah, masyarakat, dan peneliti meliputi: 1)

Implementasi kebijakan sistem poin pelanggaran yang kurang maksimal, hendaknya menjadi kajian ulang terhadap keterlaksanaan kebijakan. Perencanaan yang matang akan menjadi faktor pendukung terhadap keterlaksanaan suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik; 2) Efektivitas kebijakan sistem poin pelanggaran yang belum sepenuhnya mencapai tujuan kebijakan disebabkan karena masih lemahnya kinerja kebijakan, sehingga harus dilakukan pembenahan pada kinerja komponen pelaksana dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik; 3) Faktor kendala pelaksanaan kebijakan hendaknya dicermati oleh pihak sekolah, masyarakat dan dinas setempat, terutama tentang sumber daya pendukung, agar permasalahan lain tidak muncul dikemudian hari. Solusi dari sebuah permasalahan yang muncul dari kebijakan yang dibuat pihak sekolah bersifat sementara dan kondisional. Hal ini terkait dengan kondisi keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah yang ada. Jika sarana prasarana, kondisi, dan jumlah guru yang ada sudah memenuhi hendaknya sekolah bisa menerapkan kebijakan tersebut dengan maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abuhmaid, A. (2011). ICT Training Courses For Teacher Professional Development In Jordan, Amman, Jordan. *The Turkish Online Journal of Educational Technology, Middle East University, 10(4), 195–210.*
- Ajowi, J. O., & Enose, M. W. S. (2010). The Role Of Guidance And Counseling In Promoting Student Discipline in Secondary Schools in Kenya: A Case Study of Kisumu District. *The Turkish Online Journal of Educational Technology, Middle East Universityhe Journal of International Educational Research and Reviews, 5(5), 263–272.*

- Alhassan, A. B. (2013). School Corporal Punishment In Ghana And Nigeria As A Method Of Discipline: A Psychological Examination Of Policy And Practice. *Journal of Education and Practice*, 4, 137–147.
- Anggraini, E. N., & Tjipto, S. (2015). Pengelolaan Tata Tertib Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Varia Pendidikan*, 27, 155–151.
- Ashari, A. (2013). *Pengelolaan Tata Tertib Siswa Berbasis Poin Pelanggaran (Studi Situs SMK Negeri 3 Pacitan)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Diana, A., & Adityo, P. (2013). Rancang Bangun Sistem Informasi Kredit Poin Siswa Dengan Metodologi Berorientasi Obyek Studi Kasus: SMK Negeri 18 Jakarta. *Jurnal Teknologi Informasi*, 2, 1–6.
- Diyah, N. C. M., & Ali, I. (2016). Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan di Panti Rehabilitasi Sosial Anak). *Jurnal Kekerasan Dalam Pendidikan*, 4, 1–12.
- Gaza, M. (2012). *Bijak Menghukum Siswa*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hadianti, L. S. (2008). Pengaruh Pelaksanaan Tata Tertib Sekolah Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa (Penelitian Deskriptif Analisis di SDN Sukakarya II Kecamatan Samarang Kabupaten Garut). *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 2, 1–8.
- Himawan, Cahyadi, D., & Munawati. (2016). Prototype Sistem Informasi Perhitungan Nilai Poin Pelanggaran Tata Tertib Pada SMK Yuppentek 1 Tangerang. *Jurnal Informatika*, 9, 336–343.
- Indarto, G. (2007). *Implementasi Kebijakan Sekolah Tentang Sistem “Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa” di SMAN 1 Mejayan Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Disiplin Siswa*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Karaffillis, A. (2016). The Management of School Indiscipline in Elementary School Historical Review and Current Reality. *International Journal of Education and Training*, 3, 106–125.
- Karana, P. L. (2015). Contribution Of Negative Reinforcement Points System To Affective Discipline In III B Grade Students At SD Negeri Golo Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 17, 1–9.
- Kasih, P., & Yuni, L. (2015). Aplikasi Penghitung Point Pelanggaran Siswa Sebagai Sistem Pendukung Keputusan Bagi Badan Konseling Sekolah Dengan Simple Additive Weighting (Studi Kasus: SMKN 1 Tanah Grogot-Kaltim). *Jurnal Nusantara of Engineering*, 2, 57–64.
- Kheruniah, A. E. (2013). A Teacher Personality Competence Contribution To A Student Study Motivation And Discipline To Fiqh Lesson. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 2(2), 108–113.
- Lansford, J. E., & Dkk. (2010). Corporal Punishment of Children in Nine Countries as a Function of Child Gender and Parent Gender. *International Journal of Pediatrics*, 8, 1–12.
- Mahfud, M. (2014). Program Pendidikan Karakter dan Pemaknaan Pengembangan Soft Skills di SMK NU Gresik. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 2, 130–136.
- Maimunah. (2014). Sumber Daya Pendukung Keberhasilan Pelaksanaan Kurikulum. *Jurnal Al-Afkar*, 3, 5–15.
- Murphy, L. (2010). *Corporal Punishment in Schools and Its Effect on Academic Success*. Wasington: American Civil Liberties Union.
- Naz, A., Waseem, K., Umar, D., Mohammad,

- H., & Qaisar, K. (2011). The Impact Of Corporal Punishment On Students Academic Performance/Career And Personality Development Up To Secondary Level Education In Khyber Pakhtunkhwa Pakistan. *International Journal of Business and Social Science*, 2, 130–140.
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Nuriyah, E. S. (2015). Tata Tertib Sekolah Sebagai Sarana Pendidikan Karakter di SDN Pekuwon III Sumberejo Tahun Pelajaran 2011/2012. *Jurnal Edutama*, 2, 50–62.
- Nwosu, K. C., & Nwasor, V. C. (2013). Perceived effects of corporal punishment on adolescents' behaviours. *Journal The Nigerian Educational Psychologist*, 11, 215–225.
- Pinastika, F. D. P. (2016). School Policies In Dealing With Juvenile Delinquency At SMK Perindustrian Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 5, 241–256.
- Puspitaningrum, D., & Totok, S. (2014). Implementasi Tata Tertib Sekolah Dalam Membentuk Disiplin Siswa di SMP Negeri 28 Surabaya. *Jurnal Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2, 343–357.
- Putra, A. R. B. (2015). Peran Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Mengatasi Kecenderungan Perilaku Agresif Peserta Didik di SMKN 2 Palangka Raya Tahun Pelajaran 2014/2015. *Jurnal Konseling Gusjigang*, 1, 1–7.
- Putri, E. E., & Azis, A. (2015). Perancangan Sistem Informasi Poin Pelanggaran dan Prestasi Siswa Berbasis SMS Gateway Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Pacitan. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 4, 1–6.
- Rachmawati, R. F. (2011). Sistem Pengambilan Keputusan Terhadap Ketidakterdisiplinan Siswa SMP di SMP YZA 1 Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Informasi*, 2, 1–11.
- Rawita, S. I. (2010). *Kebijakan Pendidikan Teori, Implementasi dan Monev*. Yogyakarta: PT Kurnia Kalam Semesta.
- Richard, M. S. (2005). *Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Ridwan, S. (2015). *Kekerasan Anak*. Jakarta: Komisi Nasional Perlindungan Anak
- Rusdiana, A. (2015). *Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Setyawan, D., & Dkk. (2014). Sistem Pencatatan Poin Pelanggaran Siswa Pada SMA Negeri 1 Purwosari. *Jurnal Informatika Polinema*, 1, 13–17.
- Solehuddin, M. (2013). Dampak Kebijakan Sekolah Tentang Poin Pelanggaran Tata Tertib Siswa Dalam Membentuk Perilaku Siswa Yang Berkarakter. *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan*, 1, 62–70.
- Sudirman, Daharis, & Marjohan. (2013). Peran Guru Bimbingan dan Konseling Serta Peran Guru Mata Pelajaran Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri. *Jurnal Ilmiah Konseling*, 2, 120–124.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprastowo, P. (2013). Teacher Absenteeism Study On Primary School And Its Impact On Student. *Jurnal Education and Cultural*, 19, 31–49.
- Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kenanga Prenada Media Group.